

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara)

Oleh:
MUHAMMAD MURSYID
NIM. E42011091

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : madridista_seponti@yahoo.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Penulisan Skripsi ini didasarkan atas permasalahan Pemerintahan Desa yang belum optimal dalam pemanfaatan segala potensi yang ada di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara sistematis tentang fenomena yang dihadapi dalam menggunakan kata-kata, kalimat untuk memperoleh kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa belum optimal. Hal ini terlihat bahwa kepala desa dalam memberikan pengenalan ataupun pemanfaatan terhadap potensi yang ada di desa masih belum optimal. Upaya pemerintah desa untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya belum mampu menjadikan masyarakat sadar untuk mengelola potensi yang dimilikidesa. Pemerintah Desa dalam memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat desa dengan memberikan peluang belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan Kepala Desa Sungai Sepeti lebih meningkatkan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar tercapai pemberdayaan masyarakat.

Kata-kata Kunci : Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Potensi.

RURAL GOVERNANCE IN RURAL COMMUNITY EMPOWERMENT (Studyin The Village Of Sungai Sepeti In Seponti Kayong Utara Regency)

Abstract

Thesis writing is intended to describe and analyze the Village Governance in Rural Community Empowerment in the village of Sungai Sepeti in Seponti Kayong Utara Regency. Thesis writing is based on Village Governance issues are not optimal in the utilization of all the potential that exists in the village of Sungai Sepeti in Seponti Kayong Utara Regency. This study used a qualitative approach to describe , explain and describe systematically the phenomena encountered in using words , sentences for the conclusion and suggestions are needed governance in the rural community empowerment to improve self-sufficiency and well-being of rural communities .The conclusion of this study indicate that the governance of villages in rural community empowerment is not optimal . It is seen that the village head in giving an introduction or use of the potential that exists in the village is still not optimal . Village government's efforts to foster the ability of the community , by encouraging and raise awareness of the potential of the community and seeks to develop it have not been able to make people aware to manage potential of the village . The village government in strengthening the potential of rural communities by providing the opportunity has not done well .therefore , the authors expect the head of the village of Sungai Sepeti further improve governance tasks in the village in order to achieve community empowerment

Keywords : Village Government , Community Development and Potential .

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Desa yang terdiri dari kepala desa dengan dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta menjadikan masyarakat yang mandiri.

Pemerintah Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan, yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (12) bahwa: “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa”.

Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pihak ketiga. Upaya lainnya untuk mewujudkan pemberdayaan ini juga terkandung didalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 127 ayat (2) huruf (b) yang mengamanatkan bahwa yang harus dilakukan pemerintah desa ialah : mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini

disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat

Pemberdayaan masyarakat desa pada hakekatnya merupakan basis dari Pembangunan Nasional, karena apabila setiap desa telah mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indek kemakmuran masyarakat Indonesia. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintah desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas

sesuai tujuan yang telah disepakati bersama masyarakat.

Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik potensi fisik maupun non fisik. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu melalui pemberdayaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun potensi yang ada di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara antara lain: potensi fisik yang berupa tanah, air, lingkungan geografis, dan sumber daya manusia, dan potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparat desa.

Kondisi tanah di Desa Sungai Sepeti termasuk tanah yang subur karena sebagian besar tanahnya masih ditumbuhi tumbuh-tumbuhan liar sehingga baik digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah yang subur di Desa Sungai Sepeti dapat membuka peluang sebagai salah satu kawasan sentra produksi pertanian dan perkebunan. Dengan adanya potensi tanah yang subur tersebut tentunya penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan produksi

pertanian dan perkebunan yang ada. Namun pada kenyataannya pemerintah desa belum dapat mengoptimalkan kondisi tanah yang subur tersebut. Masyarakat desa masih belum mendapatkan bibit-bibit unggul untuk menunjang pertanian dan perkebunan mereka. Selain tanah, Desa Sungai Sepeti juga memiliki potensi air bersih, dimana masyarakat desa menyebutnya dengan nama kali alam, karena air tersebut datang dari sumber mata air sendiri yang tidak terkontaminasi oleh air asin sehingga pada musim kemarau air tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mandi, mencuci bahkan sebagai air minum. Akan tetapi, sekarang kali alam tersebut tidak lagi dilestarikan sehingga tercemar sampah, banyak ditumbuhi rumput-rumput dan cenderung keruh.

Desa Sungai Sepeti dengan keadaan geografis yang memiliki luas wilayah yang cukup luas membuat pemerintah desa sejak tahun 2009 lalu membuka lahan untuk pekebunan sawit yang dikelola oleh PT Kalimantan Agro Pusaka atau yang di singkat PT. KAP dari Pontianak yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa. Akan tetapi, pemerintah desa dalam penyelenggaraannya belum mampu memaksimalkan adanya perusahaan yang mengelola pekebunan sawit tersebut. Sebagian masyarakat belum dapat merasakan dampak positif adanya PT

perusahaan sawit tersebut. Selain mengandalkan buruh kebun sawit tersebut, masyarakat Desa Sungai Sepeti juga memiliki kemampuan dalam bidang home industry yakni pembuat tempe, tahu, dan jahit-menjahit. Yang semuanya itu didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis terhadap masyarakat tentunya dibutuhkan semangat gotong-royong yang tinggi. Untuk menumbuhkan semangat gotong-royong yang tinggi tersebut dibutuhkan sosok pemimpin desa yakni Kepala Desa untuk mengkoordinir masyarakatnya untuk saling bekerja sama sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Namun keadaan yang terlihat sekarang di Desa Sungai Sepeti rasa semangat gotong-royong mulai berkurang. Hal ini terlihat dari kepemimpinan kepala desa yang cenderung lebih mementingkan urusan diluar desanya.

Banyak organisasi maupun kelompok yang terdapat di Desa Sungai Sepeti yang dibuat guna mendukung dalam pemberdayaan masyarakat seperti : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Kelompok Kerja (POKJA), Poskamling. Tetapi organisasi tersebut kurang berjalan dengan optimal dikarenakan kurangnya perhatian dari

pemerintah desa akan pentingnya organisasi atau kelompok.

Di Desa Sungai Sepeti juga terdapat potensi lembaga Pendidikan, seperti Sekolah dan Perpustakaan Desa. Selain itu, terdapat pula Lembaga Kesehatan, Seperti Pustu, Poskesdes dan Posyandu. Namun kesemua lembaga-lembaga masih belum berjalan dengan optimal. Seperti adanya Postu bukan dijadikan tempat pelayanan bagi masyarakat untuk berobat. Justru dijadikan sebagai tempat tinggal bagi keluarga Kepala Desa yang baru datang dari Jawa. Jadi apabila masyarakat sakit dan ingin berobat mereka berdatangan ke rumah Kepala Desa yang kebetulan Istri Beliau adalah seorang Perawat.

Berdasarkan pemaparan data diatas penulis menduga bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan terhadap masyarakat desa di Desa Sungai Sepeti belum dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut diketahui dari masih kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Dengan demikian, penulis menganggap bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat sangatlah penting, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Sungai Sepeti**

Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara) “.

2. Fokus penelitian:

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas dengan memperhatikan banyaknya tugas pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yakni tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: **“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara”.**

3. Rumusan Permasalahan :

Mengingat luasnya tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka peneliti membatasi pembahasan pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan masyarakat, di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Adapun rumusan masalah yang akan dipaparkan oleh penulis adalah: **Bagaimanakah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara?**

4. Tujuan Penelitian :

Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara.

5. Manfaat Penelitian :

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk memperkaya dan menambah pengetahuan teoritik sehingga dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan berguna di bidang akademik. Khususnya dalam ilmu pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, khususnya Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat

B. KAJIAN PUSTAKA DAN METODELOGI

1. Teori

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pasal 23 menyebutkan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa yang dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 pasal 61 terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Selanjutnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pasal 26 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat.

b. Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan adalah (*empowerment*) yang berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau

keberdayaan). Ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan senantiasa mempunyai dua pengertian yang saling terkait. Masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Menurut Sulistiyani (2004:79) pada hakikatnya pemberdayaan merupakan pencapaian suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), dengan tidak menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaiknya mengantarkan pada proses kemandirian. Selain itu menurut Ketaren (2008 :178-183) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu:

1) Tahap kesadaran merupakan target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian kesadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai “sesuatu” prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun “*demand*” diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan orang luar).

2) Tahap pengkapasitasan atau memampukan (*enabling*) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.

3) Tahap pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah mereka miliki.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Kartasmita (1996:159-160) dapat dilihat dari tiga sisi:

1) Memampukan (*Enabling*), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah.

2) Membangun daya (*demand*), yaitu upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih

positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana.

- 3) Memperkuat (*empowering*), yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Kemudian, dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Kartasasmita.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan berbagai informasi yang diperoleh, baik dari data dan narasumber maupun beberapa masalah di lapangan yang penulis temukan. Metode penelitian

deskriptif secara umum adalah data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk melihat, mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik observasi terjun langsung dilapangan, wawancara bersama narasumber, dan mengumpulkan dokumentasi terkait hasil penelitan. tehnik analisis data yang dilakukan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sungai Sepeti, Sekretaris Desa Sungai Sepeti, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Urusan Pemerintahan, 2 (dua) orang Kepala Dusun (Dusun Suka Makmur dan Suka Maju) dan 3 (tiga) warga Desa Sungai Sepeti yang benar-benar mengetahui keadaan langsung dilapangan dan objek dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Penulis menggunakan teknik keabsahan data yaitu dengan menerapkan teknik triangulasi sumber dalam mengumpulkan dan mengkaji penelitian dilapangan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di desa belum optimal. Hal ini terlihat bahwa kepala desa dalam memberikan pengenalan ataupun pemanfaatan terhadap segala potensi yang ada di desa masih belum optimal. Selain itu Upaya pemerintah desa untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya belum mampu menjadikan masyarakat sadar untuk mengelola akan potensi yang dimiliki Desa. Pemerintah Desa dalam memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan memberikan peluang belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan Kepala Desa Sungai Sepeti lebih meningkatkan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar tercapai pemberdayaan masyarakat..

2. Pembahasan

a. Memampukan(*enabling*)

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada sisi memampukan (*Enabling*), di butuhkan sosok pemimpin yang mampu menciptakan suasana atau iklim sehingga mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam hal ini tentunya Kepala Desa diharapkan dapat mengenalkan maupun menghidupkan kembali bahwa sebenarnya setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan, bahwa Kepala Desa belum mampu mengembangkan potensi yang ada di desa dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kemasyarakatan desa guna mendukung kesejahteraan masyarakat yang sampai sekarang masih belum aktif. Seperti adanya Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Poskamling dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sampai sekarang belum ada yang aktif atau difungsikan dengan baik.

b. Membangun Daya(*demand*)

Membangun daya (*demand*), yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya pemerintah desa untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi

yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.

Desa Sungai Sepeti ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Seperti adanya lahan yang baik untuk pertanian dan perkebunan jika saja Kepala Desa mampu menggerakkan masyarakatnya dengan maksimal. Namun berdasarkan hasil penemuan penulis dilapangan bahwa Pemerintah Desa belum mampu membangun potensi yang dimiliki desa tersebut sehingga lahan yang ada belum dimanfaatkan dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat belum mempunyai keinginan untuk mengelola lahan tersebut.

c. Memperkuat(*empowering*)

Dengan memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki masyarakat desa, diupayakan pemerintah desa dapat membuka peluang yang akan membuat masyarakat desa makin berdaya. Seperti yang telah penulis ketahui bahwa Desa Sungai Sepeti memiliki keadaan geografis yang sangat luas dan Pemerintah Desa sendiri telah menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan sawit (PT KAP) dari Pontianak untuk memanfaatkan potensi lahan tersebut, yang diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat desa Sungai Sepeti sebagai buruh kebun. Namun yang penulis temukan di lapangan bahwa masyarakat desa belum merasakan dampak positif serta manfaat dengan

adanya perusahaan sawit yang masuk tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa belum mampu memberikan peluang yang besar terhadap masyarakat desa. Kepala Desa yang memegang kendali roda pemerintahan justru belum bisa mempekerjakan masyarakatnya dengan keadilan, disamping itu seperti yang diungkapkan Sekretaris Desa Sungai Sepeti bahwa Kepala Desa juga kurang jeli dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga peluang masyarakat untuk menambah pertumbuhan ekonomi mereka masih kurang mencukupi.

d. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

1) Faktor Internal

Identifikasi dari faktor internal yang merupakan faktor kendala penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara dikarenakan sumber daya manusianya kurang terampil dalam memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa. Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya manusia atau aparat yang merupakan unsur pemerintahan desa masih sangat

kurang dalam mengembangkan potensi-potensi desa, yang diupayakan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Kepala Desa yang merupakan aktor penting dalam sebuah kemajuan desa dan keberhasilan desa, belum mampu menjalankan peranannya dengan baik. Seperti yang diungkapkan Sekretaris Desa bahwa Kepala Desa kurang tegas dan jeli dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga peluang masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka belum terpenuhi. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa yang termasuk unsur pemerintahan desa juga belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai mitra kerja kepala desa dengan baik sehingga belum ada peraturan-peraturan desa yang seharusnya dapat menambah aset-aset desa guna kesejahteraan masyarakat belum terealisasikan. Kemudian dari perangkat desa yang lebih cenderung menunggu arahan-arahan dari Kepala Desa. Sudah seharusnya perangkat desa melakukan sumbangsi pemikiran terutama dalam memanfaatkan segala potensi yang ada di desa Sungai Sepeti.

2) Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan bahwa faktor penghambat terselenggaranya pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa

sungai seperti yang bersifat eksternal ini adalah faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi. Adapun faktor eksternal yang menghambat pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu : tingkat partisipasi masyarakat desa terhadap kemajuan desa masih kurang. Hal ini diketahui dari belum ada kemauan masyarakat untuk ikut serta membantu dan memelihara akan potensi-potensi yang ada di desa. Semangat gotong-royong mereka terhambat karena kesibukan akan masing-masing pekerjaan mereka.

Beberapa hasil temuan diatas merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya penulis belum menemukan permasalahan-permasalahan lain yang menjadi kendala pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.

D. Simpulan dan Saran

a) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis peroleh dilapangan dan penulis paparkan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam

pemberdayaan masyarakat desa di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara belum optimal. Hal ini diketahui dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Memampukan (*enabling*)

Penulis menyimpulkan bahwa pemerintahan desa dengan memberikan pengenalan ataupun pemanfaatan terhadap segala potensi yang ada di desa masih belum optimal. Kepala Desa yang merupakan aktor penting dalam sebuah kemajuan desa dan keberhasilan desa, belum mampu menjalankan peranannya dengan baik. Sudah seharusnya Kepala Desa memperhatikan tugas dan fungsinya terutama dalam hal ini yaitu berkenaan dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan sosok pemimpin yang tegas, dan jeli yang mampu mengelola dalam setiap potensi yang ada, maupun menghidupkan kembali potensi yang ada untuk dikembangkan, sehingga masyarakat makin berdaya dan sejahtera.

2. Membangun Daya (*demand*)

Upaya pemerintah desa untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta

berupaya untuk mengembangkannya belum mampu menjadikan masyarakat sadar untuk mengelola akan potensi yang dimiliki Desa. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa lebih memperhatikan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, sehingga ada kemauan dan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta membantu memelihara potensi tersebut.

3. Memperkuat (*empowering*)

Pemerintah Desa dalam memperkuat potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat desa dengan meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya belum dilaksanakan dengan baik.. Terbukti bahwa pemanfaatan lahan yang dimiliki desa belum sepenuhnya mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat desa Sungai Sepeti.

b) Saran

1. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa hendaknya mampu menciptakan suasana atau iklim sehingga mampu mengembangkan setiap potensi yang dimiliki masyarakat.

Dalam hal ini tentunya Kepala Desa diharapkan dapat mengenalkan bahwa sebenarnya setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dan menghidupkan kembali atas potensi-potensi yang telah ada di desa, serta kedekatan dengan masyarakat desa perlu ditingkatkan.

2. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa diharapkan mengupayakan masyarakat desa untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.
3. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan seharusnya dapat memperkuat segala potensi yang ada di desa. Sehingga dengan penguatan tersebut masyarakat desa dapat memperoleh peluang pekerjaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.

c) Keterbatasan penelitian

Selama melakukan penelitian dengan judul “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa (Studi di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara)”, penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan karena

penulis sendiri masih tergolong baru dalam melakukan penelitian ilmiah. Adapun keterbatasan bagi penulis yaitu sulitnya peneliti bertemu dengan narasumber yang menjadi informan dalam penelitian. Hal ini dikarenakan narasumber memiliki kesibukan tersendiri sehingga waktu yang penulis miliki terbatas untuk mengumpulkan data tersebut, sedangkan penulis berbaca dengan keterbatasan waktu penelitian yang dimiliki.

Keterbatasan lain yang dirasakan penulis yaitu kondisi jalan menuju lokasi susah untuk dilewati dikarenakan jalan rusak, jalan masih berupa tanah liat, sehingga masih banyak yang berlobang. Hal ini yang menjadi kendala penulis saat menuju lokasi penelitian. Dikarenakan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini, diharapkan kepada penulis-penulis selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian ini.

E. REFERENSI

1. Referensi Buku:

Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Bandung : Alfabeta.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.

Ketaren, Nurlela. 2008. *Buku Ajar Administrasi Pembangunan*. Medan : Fisip Usu.

Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Moenir, HAS. 2014. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta : Bumi Askara.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Stara Perss.

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Sudramanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kopetensi SDM*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Diklat)*

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

----- 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

----- 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Theresia, Aprillia., Krisna S. Andini, Prima G.P. Nugraha, and Totok Mardikanto. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.

Widjaya, HAW.2010. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Undang-Undang dan Peraturan / Jurnal / Skripsi / Tesis / Disertasi / Internet

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Abdur Rohim. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Yogyakarta

<http://mandalahurip.desa.id/lembaga-des/pemdes/tugas-pokok-dan-fungsi/>
<https://kependudukanpemdadiy.files.wordpress.com/2011/11/tugas-pokok-dan-fungsi-pemerintah-desal.pdf>
<http://new.luwuutara.go.id/images/PERDA/desa.pdf>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muhammad Mursyid
NIM / Periode lulus : E42011091 / 2015
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : madridista_seponti@yahoo.com / 085750047565

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**

(Studi di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 19 Oktober 2015

(Muhammad Mursyid)